

# **THE EFFECTS OF ECONOMIC DEPRESSION ON THE COOPERATIVE DEVELOPMENT IN YOGYAKARTA (1929-1940)**

By: Ratih Wulandari  
12407141029

## **Abstract**

A cooperative is an association focused on the economic field based on the cooperation principle and mutual cooperation. The background of the establishment of a cooperative in Yogyakarta was affected by the cooperative development in Dutch East Indies, people's socio-economic conditions, and by the existence of an informal credit system. The cooperative development reached its peak after the economic depression had happened, seen from the increasing number of cooperatives from 1930 to 1940. The major factor of it was an action pioneered by middle class people in attempting to escape from the bondage of usurers and in attempting to improve indigenous peoples' standard of living. The cooperative development became a savior for peasants and labors against the colonial capitalists' oppression. There were various types of cooperatives emerging when the economic depression happened. It was caused by the establishment of cooperatives which had to be adapted to peoples' needs. The types of the developing cooperatives included a production cooperative, a consumer cooperative, a credit cooperative, and a craft cooperative. By the establishment of those cooperative agencies, the members' welfare was increasing. Besides, the cooperative was able to improve the people of Yogyakarta's economy which was declining because of the economic depression hit in the 1930s.

**Keywords: Economic depression, Cooperative, Yogyakarta**

# **DAMPAK DEPRESI EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN KOPERASI DI YOGYAKARTA (1929-1940)**

Oleh: Ratih Wulandari  
12407141029

## **Abstrak**

Koperasi merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan berlandaskan asas kerjasama dan gotong royong. Latarbelakang munculnya koperasi di Yogyakarta dipengaruhi oleh perkembangan koperasi di Hindia Belanda, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan adanya sistem perkreditan informal. Perkembangan koperasi mencapai puncaknya setelah terjadi depresi ekonomi dilihat berdasarkan peningkatan jumlah koperasi dari tahun 1930 hingga 1940. Faktor utamanya adalah gerakan yang dipelopori oleh golongan menengah untuk berupaya melepaskan diri dari jeratan lintah darat dan keinginan memperbaiki tingkat kehidupan rakyat pribumi. Berkembangnya koperasi menjadi penyelamat bagi kaum petani dan buruh terhadap penindasan kaum kapitalis kolonial. Berbagai macam jenis koperasi muncul sejalan dengan adanya depresi ekonomi. Hal ini disebabkan karena pendirian koperasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis koperasi yang berkembang meliputi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi kerajinan. Melalui adanya badan-badan koperasi tersebut, maka kesejahteraan para anggota mengalami peningkatan, di samping itu koperasi mampu memperbaiki perekonomian masyarakat Yogyakarta yang merosot akibat hantaman depresi ekonomi tahun 1930-an.

**Kata Kunci:** *Depresi Ekonomi, Koperasi, Yogyakarta*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Hindia Belanda memasuki dekade 1930-an dikejutkan dengan munculnya depresi yang melanda dunia. Gelombang depresi yang terjadi mengakibatkan perdagangan dunia mengalami kemerosotan, sehingga mempengaruhi hampir seluruh sendi-sendi perekonomian rakyat di Hindia Belanda maupun Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, termasuk beberapa kegiatan industri-industri gula tidak dapat mengelak dari hantaman depresi ekonomi.

Adanya terjangan depresi memaksa pengusaha-pengusaha industri gula mengurangi jumlah produksi dan melakukan penghematan dengan pemberhentian pekerja demi menekan biaya. Pengambilan kebijakan ini menjadikan para pekerja perkebunan dan buruh industri gula kehilangan sumber penghidupannya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka pada akhirnya terlibat hutang dari sistem perkreditan informal dengan penerapan bunga yang tinggi.<sup>1</sup> Hutang ini dianggap mencekik petani dan pengusaha kecil yang rata-rata penghasilannya rendah dan musiman. Perkembangan kredit rakyat di Yogyakarta pada masa depresi dianggap memberikan peluang bagi kemunduran ekonomi petani.<sup>2</sup> Keadaan yang demikian menimbulkan kesadaran rakyat yang dipelopori oleh golongan menengah untuk berupaya membebaskan diri dari hutang-hutang kreditur melalui suatu badan ekonomi yaitu dengan koperasi.<sup>3</sup> Adanya koperasi dalam perekonomian masyarakat di Yogyakarta, selain memberikan fasilitas pinjaman untuk membayar hutang, juga mampu memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi untuk mengembangkan diri menghasilkan produk yang bernilai jual.

## **B. KONDISI SOSIAL EKONOMI YOGYAKARTA MASA DEPRESI EKONOMI**

Yogyakarta merupakan bagian dari Hindia Belanda yang wilayahnya berbentuk sebuah kerajaan. Luas daerah Yogyakarta sebesar 3.023,43 km<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Miftahudin, "Modernisasi di Perkotaan Jawa Abad XX: Sejarah Kota Surakarta 1903-1930-an", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 2003), hlm. 27.

<sup>2</sup> Arif Akhyat, "Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990", *Humaniora*, Vol. 27, No. 2 Juni 2015, UGM: FIB, hlm. 254.

<sup>3</sup> Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2007), hlm. 30.

Wilayah administrasinya terdiri dari 4 *regentscappen* meliputi: Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Yogyakarta di lewati oleh dua sungai utama, yakni Sungai Progo dan Sungai Opak yang merupakan sumber irigasi untuk persawahan. Jumlah penduduk di Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 1900-1930. Pada tahun 1900 penduduk Yogyakarta berjumlah 1.084.327 jiwa, kemudian bertambah hingga mencapai 1.282.815 jiwa di tahun 1920. Pada tahun 1930 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 1.558.844 jiwa.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah kerajaan, Yogyakarta menerapkan bahwa tanah yang ada di wilayah tersebut adalah kewenangan raja. Pembagian tanah pada struktur masyarakat Yogyakarta termuat dalam *Rijksblad van Yogyakarta* tahun 1918. Pada masa depresi ekonomi terjadi perubahan penggunaan tanah oleh para pengusaha perkebunan tebu di Yogyakarta. Mereka mengembalikan tanah yang dulu disewa untuk perkebunan kepada petani. Hal tersebut dikarenakan banyaknya produksi perkebunan yang tidak laku di pasaran lokal maupun dunia, bahkan harganya semakin merosot.

Perkebunan tebu dan industri gula telah menjadi salah satu industri terpenting menjelang abad ke-20 di Yogyakarta. Pada tahun 1920 terdapat 179 pabrik gula di Jawa, dan termasuk 17 pabrik gula diantaranya berada di Yogyakarta. Ketujuhbelas pabrik gula tersebut adalah Pabrik Gula (PG) Gondang Lipuro (Ganjuran), PG Padokan, PG Gesikan, PG Jebugan, PG Barongan, PG Pundong, PG Kedhaton Pleret, PG Rewulu, PG Demakijo, PG Cebongan, PG Beran, PG Medari, PG Sendangpitu, PG Sewu Galur, PG Tanjungtirto, PG

---

<sup>4</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 20.

Randugunting, dan PG Wonocatur.<sup>5</sup> Setelah depresi ekonomi jumlah pabrik gula di Yogyakarta mengalami penyusutan hingga tersisa delapan pabrik gula saja, yakni PG Tanjungtirto, PG Kedaton Pleret, PG Cebongan, PG Beran, PG Medari, serta yang ada di daerah Bantul yaitu PG Gondang Lipura, PG Padokan, dan PG Gesikan (Madukismo). Adanya depresi mengakibatkan penurunan produksi di pabrik-pabrik gula yang juga berpengaruh pada harga gula di Yogyakarta. Pada tahun 1929 harga gula superior per kwintal mencapai f 13,66. Memasuki masa depresi tahun 1930 turun menjadi f 9,9 per kwintal. Pada tahun 1931 berikutnya harga gula turun kembali menjadi f 8,06 per kwintal, sementara harga gula pada tahun 1933 mencapai titik terendah dengan nilai f 5,33 per kwintal.<sup>6</sup>

Adanya penurunan harga gula tersebut menyebabkan pabrik-pabrik gula hanya mampu menimbun persediaan barang produksi. Untuk menekan biaya akibat penimbunan produksi, maka pengusaha gula melakukan pengurangan upah dan pemberhentian pekerja secara sepihak. Hal ini kemudian menyebabkan petani dan buruh kehilangan mata pencaharian dan mengalami kesulitan uang. Untuk mengatasi kesulitan uang tersebut maka petani terpaksa menggadaikan tanah mereka untuk memperoleh pinjaman demi mencukupi kebutuhan mereka.<sup>7</sup>

Pada umumnya terdapat beberapa bentuk pemberian kredit yang berkembang di Yogyakarta, di antaranya ada 3 macam yaitu, kredit berupa padi,

---

<sup>5</sup>Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 54.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>7</sup>Egbert de Vries, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 16.

kredit uang tunai, dan kredit penggadaian tanah.<sup>8</sup> Berdasarkan berbagai macam kredit tersebut, jenis kredit dengan sistem penggadaian tanah dirasakan paling merugikan dan eksploitatif, karena langsung menyangkut pemindahan hak penguasaan atau bahkan pemilikan tanah dari debitur kepada kreditur. Pengambilan kredit yang berkembang di Yogyakarta ini biasanya berasal dari Bank Desa maupun kredit informal setempat yang dilakukan perseorangan. Besaran bunga bank yang diterapkan oleh Bank Desa di Yogyakarta disesuaikan dengan peraturan dari AVB (*Alegemeene Volkscreditbank*). Rata-rata beban bunga dari Bank Desa pada tahun 1930-1931 adalah 8% yang diambil dan dibayarkan dari penghasilan petani yang kurang dari 2 gulden.<sup>9</sup> Hal tersebut jelas semakin memberatkan karena petani selain harus membayar bunga juga masih menanggung pajak dari beban sewa. Untuk besaran kredit yang dilakukan perseorangan melalui pelepas uang ataupun rentenir di Yogyakarta diterapkan dengan memberikan beban bunga sebesar 15%. Jumlah bunga tersebut dianggap cukup tinggi untuk ukuran beban kredit di Yogyakarta masa ini.

### **C. PERKEMBANGAN KOPERASI DI YOGYAKARTA TAHUN 1929-1940**

Perkembangan koperasi di Yogyakarta dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan koperasi di Hindia Belanda dan keterpurukan nasib rakyat pribumi akibat sistem kapitalis kolonial. Perkembangan koperasi di Hindia Belanda

---

<sup>8</sup>Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 57.

<sup>9</sup>Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 79.

pertama kali dirintis pada tahun 1896 oleh Raden Aria Wiriatmadja dengan mendirikan *De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* (Bank Penolong dan Simpanan Pribumi Purwokerto). Pendirian koperasi tersebut bertolak dari beberapa pandangan mengenai badan-badan peminjaman uang di desa-desa menurut aturan *Raiffeisen*.<sup>10</sup> Usaha-usaha yang dilakukan Raden Aria Wiriaatmadja ini selalu mendapat halangan dari pemerintah kolonial. Tindakan politik pemerintah untuk menghalangi perkembangan koperasi dilakukan dengan cara mendirikan *Algemeene Nallescridiet Bank*, Rumah Gadai, dan Bank Desa sebagai pesaing koperasi yang dirintis penduduk pribumi.<sup>11</sup>

Pada tahun 1900 Raden Mas Soerjopranoto melalui sebuah organisasi bernama Mardi Kaskaya di Yogyakarta membentuk sebuah koperasi yang sebagian besar pengurus organisasi adalah kerabat Pakualaman. Koperasi ini merupakan bentuk koperasi simpan pinjam. Sehubungan dengan keberadaan organisasi Mardi Kaskaya, ruang gerak rentenir di Yogyakarta semakin berkurang. Adanya koperasi ini sering mendapat saingan dari pihak renternir maupun penguasa. Akibatnya banyak terjadi konflik terbuka antara anggota Mardi Kaskaya dengan rentenir, sehingga pejabat kolonial mengirim Soerjopranoto ke MLS (*Middelbare Landbouw School*). Kepergian Soerjopranoto dari organisasi Mardi Kaskaya mengakibatkan koperasi tidak mampu bertahan dan harus dibubarkan karena tidak ada pengganti Soerjopranoto sebagai penggerak koperasi.

---

<sup>10</sup>Suradjiman, *Ideologi Koperasi: Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*, (Bandung: Ganaco N.V, 1963), hlm. 43-46.

<sup>11</sup>R.M. Margono Djojohadikusumo, *Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940)*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2013), hlm. 67.

Perkembangan koperasi selanjutnya sejalan dengan kemajuan pergerakan nasional. Realisasi pembentukan koperasi dipelopori oleh organisasi Budi Utomo pada kongres I di Yogyakarta yang berhasil merumuskan usaha-usaha yang akan diupayakan sebagai bentuk perjuangan nasional.<sup>12</sup> Hasil dari kongres Budi Utomo tersebut adalah:<sup>13</sup>

1. Memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang pendidikan,
2. Memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi.

Koperasi konsumsi Budi Utomo ini bernama “Toko Andil”.<sup>14</sup> Toko Andil bertujuan menjual barang-barang keperluan sehari-hari bagi anggota koperasi maupun masyarakat luas, namun pada akhirnya koperasi tersebut mengalami kegagalan. Cita-cita koperasi kemudian muncul kembali dipropagandakan dan diperjuangkan oleh Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipelopori H. Zarkasi di Yogyakarta dan H. Samanhudi di Surakarta. Organisasi SDI didirikan mempunyai tujuan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan para pedagang khususnya yang beragama Islam dan secara tidak langsung juga bertujuan menyaingi dan menghilangkan organisasi distribusi asing, khususnya perdagangan perantara yang didominasi oleh orang Cina. Koperasi yang didirikan SDI dilatarbelakangi oleh

---

<sup>12</sup> Suradjiman, *op.cit.*, hlm. 47.

<sup>13</sup> Sri Edi Swasono (ed.), *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 60.

<sup>14</sup> Edilius, et all., *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, cet-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 38.

semakin terdesaknya para pedagang batik pribumi terhadap pedagang Cina perantauan yang telah menguasai penjualan mori dan lilin (malam) sebagai bahan dasar batik. Namun, toko-toko koperasi yang didirikan SDI dalam waktu relatif singkat juga mengalami kemacetan dan tidak mampu melanjutkan usahanya. Tidak terwujudkannya pembentukan koperasi pada masa pergerakan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. Belum adanya lembaga pemerintah maupun swasta yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi, baik dari segi dasar hukum maupun pengelolaan.
- b. Ide koperasi hanya muncul dari segelintir orang dan tidak mendapat dukungan secara luas dari masyarakat.
- c. Belum adanya undang-undang tentang perkoperasian.

Pemerintah Belanda menanggapi perkembangan koperasi di kalangan kaum pergerakan dengan rasa kekhawatiran dan berusaha untuk menghalangi setiap pendirian koperasi. Agar perkembangan koperasi tidak semakin meluas, maka pemerintah kolonial pada tahun 1915 mengeluarkan undang-undang koperasi pertama kali yaitu *Verordening op de Cooperatieve (Koninklijk Besluit 7 April 1915)*.<sup>16</sup> Undang-undang ini merupakan tiruan undang-undang koperasi tahun 1876 yang diterapkan di negara Belanda. Pada dasarnya penetapan undang-undang koperasi tahun 1915 membuat perkembangan koperasi semakin menurun

---

<sup>15</sup>Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm. 51.

<sup>16</sup>Lihat *Staatsblad Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1915 No. 431, tentang *Verordening op de Cooperatieve*, hlm. 2.

karena disertai dengan persyaratan yang menyulitkan.<sup>17</sup> Adanya undang-undang tersebut mendapat tentangan keras dari kaum pergerakan nasional yang menuntut penggantian peraturan. Pemerintah Belanda kemudian menetapkan peraturan baru yaitu Undang-undang Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*.<sup>18</sup> Undang-undang tahun 1927 ini merupakan undang-undang koperasi pertama yang ditujukan khusus untuk kaum bumi putera.

Pemberlakuan undang-undang koperasi tahun 1927 menjadi awal perkembangan pesat koperasi di Hindia Belanda maupun Yogyakarta. Hal ini dikarenakan terdapat keringanan mengenai persyaratan pembentukan koperasi dan kemudahan bagi rakyat untuk menjadi anggota. Adanya kelonggaran dalam pembentukan koperasi juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan koperasi mengalami peningkatan pada tahun-tahun setelah depresi ekonomi. Pertambahan jumlah koperasi selain karena keadaan perekonomian yang memaksa dan adanya undang-undang koperasi tahun 1927, juga didorong oleh organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menyelenggarakan Kongres Koperasi pada tahun 1929.<sup>19</sup> Kongres tersebut berhasil menghimpun rakyat pribumi untuk bersedia menjadi anggota-anggota koperasi di setiap daerah. Pada bulan Juni 1930, Pangeran Surjodiningrat, mendirikan PKN (Pakempalan Kaula Ngayogyakarta

---

<sup>17</sup>Ninik Widiyanti dan Y.W. Suwindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Pustaka, 1988), hlm. 26.

<sup>18</sup> Termuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1927 No. 91, tentang *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*, hlm. 3.

<sup>19</sup>Eddiwan. "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Indonesia". Dalam Sri Edi Swasono (ed.), *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 130-131.

atau Perkumpulan Warga Yogyakarta). Pada bulan Mei 1931, organisasi tersebut mempunyai anggota lebih dari 100.000 orang di Yogyakarta. Karena aktif membela kepentingan kaum tani, maka PKN mulai menjadi semacam pemerintahan bayangan dan banyak petani yang tertarik kepada organisasi tersebut dengan keyakinan bahwa Surjodiningrat adalah Ratu Adil. Organisasi ini juga membangkitkan dendam dari birokrasi dan bangsa Belanda. Adanya tekanan dari pemerintah dan gangguan dari pihak kepolisian setelah tahun 1934 memaksa Surjodiningrat membatasi kegiatan-kegiatan PKN pada masalah-masalah sosial ekonomi, khususnya usaha memajukan koperasi-koperasi. Kaum nasioanalis kota juga bersedia menjalin hubungan dengan organisasi yang nyata-nyata bersifat feodal seperti itu.

Pada tahun 1936 Jawatan koperasi mengadakan penggabungan yang diberi nama “*Moeder Central*” yang selanjutnya diubah menjadi Gabungan Pusat Koperasi Indonesia (GAPKI).<sup>20</sup> Pembentukan gabungan pusat koperasi ini bertujuan untuk memudahkan hubungan perkumpulan koperasi di setiap daerahnya. Yogyakarta mendapat kesempatan untuk mendirikan dan mengelola sebuah koperasi pusat yang bernama *Centrale Pensiuibank*. Melalui penggabungan koperasi tersebut maka pengelolaan dan peningkatan koperasi lebih terarah. Melalui adanya penggabungan pusat koperasi, maka pembentukan koperasi-koperasi baru terus berkembang.

Pada masa depresi ekonomi ini peran kelas menengah pribumi mulai terlihat selain dalam bidang politik dan pendidikan juga pada bidang ekonomi.

---

<sup>20</sup>Edillius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, cet-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 42.

Mereka mulai menyusun alternatif untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat pribumi. Suatu hal yang menarik, bahwa untuk menyikapi kondisi krisis ekonomi ini, banyak usaha yang dilakukan kaum terpelajar untuk mendirikan kursus tenun, bank-bank, koperasi-koperasi, dan sebagainya. Kedudukan kelas menengah ini mendukung kemajuan kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat. Kaum menengah berpikir mengenai cara yang perlu dilakukan agar kesulitan ekonomi masyarakat dapat teratasi. Kesadaran tersebut mencetuskan pandangan di kalangan rakyat untuk mengadakan gerakan-gerakan terutama di bidang ekonomi, sehingga pada saat itu muncul kekuatan ekonomi baru. Gerakan ini dalam bidang ekonomi pada kenyataannya memang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi, yaitu struktur yang cenderung lebih tahan dari hantaman depresi ekonomi. Ekonomi koperasi inilah yang digalakan oleh kaum pergerakan untuk mengentaskan kesulitan ekonomi akibat depresi ekonomi.

#### **D. PENGARUH DEPRESI EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN KOPERASI DI YOGYAKARTA**

Kehadiran koperasi pada masa depresi ekonomi mempunyai dua peran penting<sup>21</sup> yaitu, koperasi dapat mempersatukan rakyat menurut lapangan kehidupannya masing-masing dan dapat menghambat proses diferensiasi atau terpecah-pecahnya produsen-produsen kecil, sehingga koperasi mempunyai unsur mempersatukan rakyat yang lemah ekonominya. Melalui persatuan dan kerjasama tersebut, maka rakyat dapat berusaha mengurangi penghisapan tuan

---

<sup>21</sup>Sagimun Mulus Dumadi, *Indonesia Berkoperasi*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1954), hlm. 49.

tanah, lintah darat, tukang *ijon*, tengkulak, dan kapitalis-kapitalis lain yang menekan mereka.<sup>22</sup> Perkembangan koperasi di Yogyakarta selanjutnya mengalami pertumbuhan pesat dilihat berdasarkan munculnya berbagai jenis-jenis koperasi yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat pribumi. Jenis-jenis koperasi tersebut meliputi koperasi produksi pertanian, koperasi perikanan, koperasi buruh dan koperasi kerajinan.<sup>23</sup> Tercatat perkembangan koperasi di Yogyakarta terus mengalami peningkatan pada periode tahun 1930-1939. Pada tahun 1930 terdapat 21 koperasi yang aktif dengan modal f 12.009. Jumlah tersebut meningkat menjadi 58 koperasi pada tahun 1931 dengan modal sebesar f 20.030.<sup>24</sup> Tahun selanjutnya jumlah koperasi semakin meningkat menjadi 162 buah.

Pada periode tahun 1931-1939 keseluruhan jumlah koperasi di Yogyakarta mencapai 176 buah. Pertambahan jumlah dan jenis koperasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang menjadi anggota koperasi yang ikut andil dalam pengelolaan koperasi. Anggota-anggota koperasi di Yogyakarta lebih didominasi oleh petani, buruh dan pekerja serta pengusaha-pengusaha kecil. Jumlah anggota koperasi di Yogyakarta secara keseluruhan pada akhir tahun 1939 sebanyak 2.390 anggota. Berikut merupakan jenis-jenis koperasi yang memiliki peranan penting di Yogyakarta pada masa depresi yang mampu menyelamatkan perekonomian.

---

<sup>22</sup>Saroso Wirodihardjo, *Koperasi dan Masalah Batik*, (Jakarta: GKBI, 1954), hlm. 36

<sup>23</sup> R.M, Margono Djojohadikusumo, *op. cit*, hlm. 83.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 74

## 1. Koperasi kredit

Perkembangan koperasi kredit didasari oleh kepentingan setiap rakyat pribumi pada masa depresi untuk memperoleh pinjaman. Hal ini mengingat mereka mengalami kesulitan keuangan karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Jumlah koperasi kredit di Yogyakarta meningkat dari jumlah semula tahun 1932 terdapat 29 koperasi, kemudian pada akhir tahun 1939 bertambah menjadi 32 koperasi.<sup>25</sup> Koperasi kredit didirikan untuk membebaskan rakyat desa dari orang-orang yang memberikan pinjaman kredit dengan bunga atau dengan kata lain rentenir,<sup>26</sup> sehingga dengan adanya koperasi kredit maka ruang gerak rentenir semakin berkurang.

## 2. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi bertujuan melayani langsung kebutuhan hidup sehari-hari para anggotanya seperti kebutuhan akan beras, gula, teh, dan keperluan rumah tangga lainnya. Produk-produk yang dijual di koperasi konsumsi umumnya dengan standar harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga barang-barang yang dijual di pasaran. Hal ini berakibat pada banyaknya saingan dari penjual lain yang terus berusaha menguasai harga. Politik yang dilakukan para pedagang dipasaran ini berhasil memperburuk kondisi koperasi konsumsi yang pada dasarnya tidak memiliki pengalaman dan kepandaian dalam mencari barang-barang konsumsi yang lebih miring dan belum mampu mengadakan persiapan yang lengkap dalam persediaan modal. Salah satu yang menyebabkan jatuhnya

---

<sup>25</sup> R.M, Margono Djojohadikusumo, *op. cit*, hlm. 93.

<sup>26</sup> Sri Edi Swasono (ed.), *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 143.

koperasi konsumsi pada masa ini juga dikarenakan sistem kredit yang digunakan pedagang lain untuk menarik simpati pembeli yaitu dengan memberi kesempatan orang membeli secara menyicil dan dibayar pada akhir bulan. Sistem ini tidak dapat dilakukan di koperasi karena sistem pembelian di koperasi dengan cara tunai.

### 3. Koperasi Produksi

Jumlah koperasi produksi di Yogyakarta pada akhir tahun 1939 tercatat 46 buah. Pada jenis koperasi produksi ini merupakan perpaduan antara dua fungsi yaitu penjualan dan pembelian. Adanya koperasi produksi ini maka para pengusaha kecil mampu menjual produk mereka dengan harga-harga yang rendah maka harus bekerjasama dengan organisasi koperasi produksi untuk mencari harga yang stabil dan standar sehingga tidak merugikan pengusaha maupun anggota koperasi yang juga melakukan kegiatan produksi.

### 4. Koperasi Kerajinan

Pada dekade 1930-an berkembangnya industri manufaktur (kerajinan) lokal di Hindia Belanda.<sup>27</sup> Salah satu kerajinan yang berkembang dan masih tetap berjaya di Yogyakarta adalah kerajinan batik. Pada tanggal 5 Juni didirikan organisasi yang dinamakan Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera dengan pelopornya antara lain Djajengkarso, H. Bilal, Mangunprawiro, H. Zarkasi, H. Abubakar, Saebani, Ronosentiko, Ramelan, H. Muchadi, M.Ng, Sutoprawiro, dan H. Romowiruno. Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera atau yang disingkat dengan PPBBP merupakan sebuah koperasi yang didasarkan pada Undang-

---

<sup>27</sup> Soeri Soeroto. "Sejarah Kerajinan di Indonesia". *Prisma*, 18 Agustus 1983, hlm. 21.

undang Koperasi tahun 1927 No.91.<sup>28</sup> Pada awalnya koperasi batik PPBBP ini beranggotakan pengusaha batik yang terdiri dari 63 orang pria dan 11 wanita.<sup>29</sup> Seluruh anggota koperasi batik ini merupakan pengusaha batik aktif di Yogyakarta. Koperasi batik PPBBP sudah berdiri sejak tahun 1934, akan tetapi organisasi koperasi itu baru mendapatkan badan hukum pada tahun 1939. Hal ini dikarenakan koperasi PPBBP mendapat hambatan oleh peraturan pemerintah. Koperasi PPBBP menjadi koperasi batik pertama di Yogyakarta, yang mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Membeli langsung bahan baku batik dari *convenant*.
- b. Mendatangkan sendiri bahan baku batik dari luar negeri.
- c. Mendirikan pabrik mori dan obat-obat batik.
- d. Mendirikan badan kredit untuk menolong anggota koperasi dari lintah darat.
- e. Mencarikan pemasaran batik dan penjualan bersama.

Adanya gerakan koperasi tidak hanya membantu rakyat kecil dari himpitan kaum pemodal, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri, kemandirian, solidaritas, setia-kawan, dan tolong-menolong di kalangan rakyat Indonesia. Melalui prinsip jiwa berdikari maka rakyat Indonesia menyadari kemampuannya untuk tidak pasrah ditindas oleh kaum modal kolonial. Jiwa berdikari atau *self help* juga menjadi senjata bagi rakyat kecil untuk mempersekutukan kekuatannya melawan keganasan kapitalisme.

---

<sup>28</sup>Saroso Wirodihardjo, *op.cit.*, hlm 54.

<sup>29</sup>*Sejarah Singkat Koperasi PPBI*, (Yogyakarta: Koperasi PPBI, 1970) hlm. 5

Koperasi membebaskan para anggota-anggotanya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk memproduksi mengembangkan daya kreasi dan daya ciptanya sesuai petunjuk dan anjuran badan koperasi. Produk-produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga meningkatkan pula jumlah pendapatan baik untuk setiap anggota maupun masyarakat. Manfaat lainnya mengenai adanya badan koperasi bagi masyarakat luas yaitu untuk menghindarkan masyarakat terhadap monopoli penguasa Prinsip koperasi secara tidak langsung telah memberikan ide dan konsepsi tentang ekonomi kerakyatan dan kemakmuran bersama. Koperasi memberikan jalan bagi rakyat untuk memperbaiki ekonominya, seperti contohnya koperasi kredit yang didirikan bagi rakyat yang kekurangan modal untuk usaha. Koperasi produksi mampu melindungi produsen untuk menetapkan harga yang sesuai dengan pasaran dan terutama melindungi dari persaingan dengan produsen asing, sementara itu koperasi konsumsi yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehari-hari yang menjual barang-barang rumah tangga dengan harga yang murah.<sup>30</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Depresi ekonomi yang terjadi tahun 1930-an menyebabkan anjloknya siklus perdagangan internasional yang mempengaruhi harga komoditi ekspor di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Begitu pula keadaan perekonomian di Yogyakarta yang berorientasi pada perdagangan juga mendapat dampak kemerosotan ekonomi dunia. Pada masa sebelum depresi,

---

<sup>30</sup>Mohammad Hatta, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*, (Jakarta:Djembatan,1968),hlm. 12.

Yogyakarta merupakan daerah dengan lahan yang luas yang digunakan untuk perkebunan tebu sebagai bahan penghasil komoditi ekspor gula. Pada awal abad ke-20 gula merupakan industri dengan kapasitas besar yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan merupakan komoditi terpenting di Yogyakarta.

Kebijakan perusahaan gula di Yogyakarta dalam menghadapi depresi dilakukan dengan cara pengurangan produksi dan bahkan memberhentikan tenaga kerja. Hal ini menjadikan buruh pabrik dan petani menjadi pihak yang sangat dirugikan. Banyak perkebunan tebu dan industri gula di Yogyakarta yang pada akhirnya gulung tikar akibat tidak mampu beroperasi. Kehilangan mata pencaharian dan tidak lagi memiliki tanah pertanian untuk menghasilkan bahan makanan sendiri, membawa hidup para petani dan buruh di Yogyakarta berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengatasi kesulitan uang yang dirasakan oleh masyarakat terlebih petani dan buruh di Yogyakarta, mereka kemudian melakukan pinjaman atau kredit berjangka pada para pelepas uang dengan bunga yang sangat tinggi. Kredit rakyat di Yogyakarta mencapai perkembangan yang signifikan pada sekitar depresi ekonomi tahun 1930-an. Kredit ini memunculkan banyak persoalan terkait ekonomi pedesaan mengenai pemberian bunga yang tinggi baik melalui Bank Desa maupun perseorangan (*pelepas uang*), sehingga memberikan peluang bagi kemunduran ekonomi petani Yogyakarta. Kesulitan keuangan dan banyaknya hutang yang dialami oleh rakyat menimbulkan kesadaran dan dorongan untuk mencari suatu usaha sebagai solusi membebaskan diri dari kesengsaraan. Solusi

tersebut dengan cara pendirian badan-badan ekonomi yang berasaskan kerjasama dan persamaan nasib, yaitu melalui koperasi.

Awal munculnya koperasi di Yogyakarta dipengaruhi oleh pendirian koperasi yang dirintis oleh Raden Aria Wiriatmadja tahun 1896 dengan nama *De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofben* (Bank Penolong dan Simpanan Pribumi Purwokerto). Pada tahun 1900 pembentukan koperasi di Yogyakarta juga telah dirintis oleh Raden Mas Soerjopranoto melalui sebuah organisasi bernama Mardi Kaskaya, yang sebagian besar pengurus organisasi ini adalah kerabat Pakualaman. Organisasi Mardi Kaskaya lebih mirip seperti koperasi simpan pinjam. Sehubungan dengan keberadaan Mardi Kaskaya, ruang gerak rentenir di Yogyakarta semakin berkurang. Cita-cita koperasi kemudian dipropagandakan dan diperjuangkan lagi oleh Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan para pedagang khususnya yang beragama Islam, tetapi pada akhirnya toko-toko koperasi yang didirikan dalam waktu singkat mengalami kemacetan dan harus dibubarkan.

Koperasi mengalami perkembangan kembali pada dekade 1930-an setelah terjadi depresi ekonomi dunia. Munculnya usaha koperasi pada masa ini juga didukung sejak dikeluarkan Undang-Undang Koperasi atau Ordonansi Perkumpulan Koperasi Bumiputra tahun 1927. Undang-undang ini memberikan kemudahan bagi pendirian dan penetapan badan hukum koperasi. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pada masa depresi merupakan suatu solusi rakyat pribumi menghadapi kesulitan keuangan akibat pemberhentian pekerjaan, upah yang rendah dan merosotnya perdagangan. Koperasi terus mengalami perkembangan

sehingga muncul jenis-jenis koperasi yang terdiri dari koperasi pusat, koperasi produksi, koperasi kredit, koperasi konsumsi dan koperasi kerajinan. Pertumbuhan dan peningkatan jumlah koperasi kemudian sangat membantu menaikkan tingkat kesejahteraan anggota pada setiap perkumpulan koperasi di Yogyakarta baik di pedesaan maupun perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip:

*Indische Verslag* tahun 1931, *Hoofdbestanddelen der bevolking van Gouvernement Jogjakarta*.

*Indische Verslag* tahun 1931, *De suikerplantages van Gouvernement Jogjakarta*.

*Indische Verslag* tahun 1931, *De niet Ingeschreven (wilde) Inlandsche cooperaties op Java, Onderscheiden naar Hoofdfunctie 1931*.

*Indische Verslag* tahun 1933, *De niet Ingeschreven (wilde) Inlandsche cooperaties op Java 1932*.

*Indische Verslag* tahun 1933, *Hoofdbestanddelen der bevolking (uitkomstvenen de volkstelling 1930)*.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1927 No. 91, *Regeling op de Cooperatieve Vereenigingen van Inlanders*.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1933 No. 108, *Algemeene regeling op de Cooperatieve Vereenigingen*.

*Rijksblad van Kasultanan Yogyakarta* Tahun 1918.

### Buku:

Arif Akhyat, "Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990", *Humaniora*, Vol. 27, No. 2 Juni 2015, UGM: FIB.

Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1995.

- De Vries, Egbert, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Eddiwan. "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Indonesia". Dalam Sri Edi Swasono (ed.), *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Edillius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, cet-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kurasawa, Aiko., *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo, 1993.
- Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1968.
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Pembangunan*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Bina Adiaksara, 2007.
- Sejarah Singkat Koperasi PPBI*, Yogyakarta: Koperasi PPBI, 1970.
- Sagimun Mulus Dumadi, *Indonesia Berkoperasi*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1954
- Saroso Wirodihardjo, *Koperasi dan Masalah Batik*, Jakarta: GKBI, 1954.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Soeri Soeroto. "Sejarah Kerajinan di Indonesia". *Prisma*, 18 Agustus 1983.
- Sri Edi Swasono (ed.), *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suradjiman, *Ideologi Koperasi: Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*, Bandung: Ganaco N.V, 1963.

**Skripsi:**

Ari Nuryani, "Pengaruh Zaman Malaise Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Yogyakarta (1929-1939)" *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2009.

Wining Widiati, "Pengaruh Koperasi Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Jawa (1930-1945)", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2004.

Yogyakarta, 19 Oktober 2016

Pembimbing



Dina Dwikurniarini, M.Hum  
NIP. 19571209 198702 2 001

Reviewer



Drs Dwi Marwan  
NIP. 19560101 198502 1 001